

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD 1945 Amandemen IV.

\_\_\_\_\_ - *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

\_\_\_\_\_ - *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

\_\_\_\_\_ - *Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

\_\_\_\_\_ - *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

\_\_\_\_\_ - *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi*, Perma No. 13 Tahun 2016.

\_\_\_\_\_ - *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan*, Sema No. 4 Tahun 2021.

### B. Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

\_\_\_\_\_ - *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Abidin, Zainal Andi. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Angger, Singgit dan Faudy Primaharsya. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Budianto, Agus. *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*. Solo: Graha Cipta Manahan, 2012.
- Farouq, M. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Firda, Catharina Vista Okta. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2020.
- Guandi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Insan, H Isep. *Jerat Hukum Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Di Indonesia*. Bobor: UIKA Pers, 2021.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Lamintang, PAF dan Lamintang Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muladi dan Priyatno Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamia Group, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sofyan, Andi dan Asis, Abd. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

\_\_\_\_\_. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Yustinus, Prastowo. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

### C. Lain-lain

Anonim. "Memahami Kepastian Dalam Hukum". Tersedia di <https://ngobrol.hukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

Azmi, Ilima Fitri dan Arifki, Nindi Achid. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan". *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 24, No.1. 2018.

Insan, H Isep dan Maghijn, Tisha Nidia. "Penerapan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya". *Pakuan Law Review*. Vol. 4, No.2. 2018.

Jayanti, Dian Dwi. "Sanksi Wajib Pajak yang Tidak Laporkan SPT: Hukum Online". Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-wajib-pajak-yang-tidak-lapor-spt-lt5ae287b8acb25>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023.

Juli, Wan dan Suharti, Titik. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Dibiidang Perpajakan". *Perspektif*

Maimanasari, Siti Ketaren dan Alvi Ayahrin. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan". *USU Law Journal*, Vol.II, No. 2. 2013.

Pajak, Online. "Penyebab Seseorang Dijatuhi Sanksi Pidana Pajak". Tersedia di: <https://www. Online - pajak.com /tentang-pajak/sanksi-pidana-pajak#:~:text=Penyebab%20Seseorang%20Terkena%20Pidana%20Pajak&text=Wajib%20pajak%20dengan%20sengaja%20tidak, Menyalahgunakan % 20 Nomor % 20 Pokok % 20 Wajib%20Pajak.> Diakses pada tanggal 18 Maret 2023.

S, Rachel Yolanda Pratiwi. "Sanksi Penyalahgunaan NPWP dan PKP". Tersedia di: <https://www.pajak.com/pajak/sanksi-penyalahgunaan-npwp-danpkp/#:~:text=Setiap%20orang%20yang%20dengan%20sengaja,umlah%20pajak%20terutang%20yang%20tidak.> Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

Suharini, Sri. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A. Tanggal 29 Mei 2023.